

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Nomor : 30/HK.01/K.SG/03/2024
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Tim Penyusun dibentuk melalui rapat Pleno dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
 - d. Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,



Iwan Rompo Banne

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 30/HK.01/K.SG/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Iwan Rompo Banne	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
2.	Bahari	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
3.	Darma	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
4.	H. Heri Iskandar	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
5.	Indra Eka Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
6.	H. Heri Iskandar	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Sekretaris			
7.	Rapiuddin	Kepala Sekretariat	Sekretaris
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Rezky Olivia Weryana Abunawas	Kabag. Hukum, Humas dan Datin	Ketua
9.	Rusdy Ashar	Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua I
10.	Syahr Ibnu Isnain	Kabag. Pengawasan	Wakil Ketua II
11.	Tien Novita U. Silondae	Kabag. Administrasi	Wakil Ketua III
V. Anggota			
12.	Ahmad Iskandar Zulkarnain	Analisis Produk Hukum	Anggota
13.	Ayu Rizki Permatasari	Analisis Hukum	Anggota
14.	Dirwan Kalam	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
15.	Andi Sulhan	Analisis Data dan Informasi	Anggota
16.	Samuel Ian Hasler	Analisis SDM Aparatur	Anggota
17.	Ridwan	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
18.	Amriadin	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
19.	Harfandy Siman Gustamin	Staf yang membidangi Humas	Anggota
20.	Andi Aman	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
21.	Ricky Hermawan Hakim	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
22.	Valentino Putra Parlan	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
23.	Rudi	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
24.	La Ode Udin	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,



Iwan Rompo Banne